



Proyeksi Kepemimpinan Menghadapi Pandemi COVID-19

Oleh: Fadhilah Aunillah

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan yang krusial di Indonesia. Adanya kebijakan pembatasan di tengah masyarakat memunculkan masalah baru yakni munculnya krisis ekonomi. Dalam menghadapi keadaan ini dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang dapat memunculkan leadership skillnya dalam menangani krisis yang sedang terjadi terutama dalam membuat sebuah keputusan.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kebijakan, Pemerintah

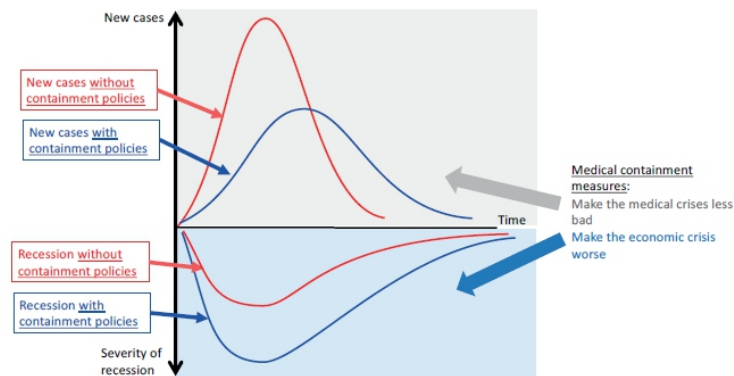
MASALAH

Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah krusial di seluruh dunia. Sudah lebih dari 5 juta orang yang terinfeksi dan 380 juta orang yang meninggal di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia jumlah penderita telah mencapai angka 23 ribu dengan 1.400 orang yang meninggal (<https://covid19.go.id/>) Terus meningkatnya angka penderita menunjukkan betapa mudahnya virus ini menyebar di tengah masyarakat.

Mudahnya virus ini tersebar di tengah masyarakat memunculkan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ini menyebabkan masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan normal. Berbagai sektor ekonomi terpaksa dihentikan demi menghentikan penyebaran COVID-19. Hal ini tentu berdampak besar pada munculnya permasalahan ekonomi terutama bagi Indonesia yang sebagian besar penduduknya ada di sektor informal. Berdasarkan data Kemnaker per 1 Mei 2020 Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang. Keadaan ini menunjukkan bahwa COVID-19 bukan perkara masalah kesehatan semata namun juga telah melebar menjadi krisis ekonomi.

1. Dikembangkan dari hasil diskusi acara webinar tema “Review dan Proyeksi Indonesia pasca COVID-19” yang diselenggarakan oleh program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Mei 2020.
2. Data terupdate 26 Mei 2020. Diakses dari laman resmi Gugus Tugas Covid-19. <https://covid19.go.id/>





Sumber: Mitigating the COVID Economic Crisis, Centre for Economic Policy Research (CEPR) 2020.

Krisis yang sedang kita hadapi saat ini berbeda dengan krisis pada periode-periode sebelumnya. Situasi yang terjadi saat ini dihadapkan pada pilihan mengutamakan kesehatan atau ekonomi terlebih dahulu? Menurut data dari CEPR kebijakan yang berhubungan dengan saah satu aspek akan mengorbankan aspek yang lainnya. Jika pemerintah berupaya menurunkan kurva medis di sisi lain resesi ekonomi akan meningkat, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu perlu kombinasi kebijakan yang tepat agar dapat menekan dampak yang akan muncul pada aspek yang lain. Kebijakan yang baik akan terlahir dari adanya kemampuan pemimpin dalam mengelola krisis.

Pemimpin dalam hal ini menjadi garda terdepan dalam pembuatan keputusan dihadapkan pada dua pilihan : (a) menganggap ringan masalah ini dan bertahan dengan gaya kepemimpinannya, (b) menyesuaikan diri agar berhasil melewati perubahan (Moeldjono, 2020). Tentu saja yang diperlukan saat ini adalah kemampuan pemimpin yang mampu beradaptasi dan mampu memberikan komando terarah terhadap setiap kebijakan yang diambil. Menurut Center of Creative Leadership ketika menghadapi krisis, sebagian besar pemimpin dipaksa untuk berpikir dan berperilaku dengan cara yang terasa asing. Krisis menuntut para pemimpin mengambil rencana tanggap darurat dan mengadaptasinya ketika berbagai faktor baru muncul dengan sendirinya.

Di Indonesia sendiri muncul beberapa urgensi yang membutuhkan hadirnya seorang pemimpin yang mampu mengatasi krisis di tengah pandemic COVID-19:

Urgensi

1. Adanya Valley of death

Salah satu aspek yang menyebabkan kegagalan dalam menerapkan kebijakan adalah karena valley of death yakni adanya jurang pemisah yang sangat dalam antara produsen pengetahuan/data dengan policy making (Hadna, 2020). Keputusan diambil berdasarkan lingkaran orang-orang yang ada di sekitar pemimpin tanpa mengikutsertakan pendapat para ahli serta data yang ada di lapangan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil bukan menyelesaikan permasalahan namun justru menambah permasalahan di lapangan.

3. Terdapat friksi politik dan munculnya distrust dari masyarakat

Seorang yang diusung oleh golongan manapun ketika telah menjadi seorang pemimpin seharusnya mampu mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan lagi menjadi alat bagi golongannya. Jika pemimpin masih mengutamakan kepentingan golongannya bukan tidak mungkin terjadi distrust masyarakat terhadap dirinya. Hal ini karena masyarakat mampu menilai pemimpin mana yang bertindak dengan tulus dan mana yang masih terkungkung oleh friksi politik (Hadna, 2020).

2. Fenomena saling menyalahkan

Bukan hal baru di Indonesia terjadi fenomena saling menyalahkan ketika pemimpin yang satu mengambil keputusan. Pemerintah terlihat tidak mampu membangun sinergi dan justru menyalahkan pemimpin lainnya baik atas dasar kepentingan politik maupun yang lainnya (Damanik, 2020). Hal ini justru memunculkan pertengkaran sebagai masalah baru dan menggeser fokus untuk menyelesaikan tujuan utama yakni menghentikan penyebaran COVID-19.

Rekomendasi

1. Pentingnya pemimpin menerapkan *Evidence Based Policy*

Science dan data di lapangan dapat menjadi salah satu evidence yang penting dipertimbangkan dalam mengambil keputusan (Hadna, 2020). Melibatkan ahli epidemiologi hingga tenaga kesehatan pada saat ini menjadi penting untuk mengambil kebijakan berdasarkan data dan teori yang berlaku. Perlu ada jembatan yang menghubungkan science dan data menjadi sebuah kebijakan yang strategis sehingga ketika diterapkan di lapangan kebijakan tidak justru memunculkan masalah baru. Pemimpin memegang peranan penting untuk dapat mengkombinasikan berbagai data dan science yang ada dengan kepentingan di tengah masyarakat sehingga memunculkan valley of death.

2. Pemimpin yang saling bersinergi dalam mengatasi masalah bersama

Sinergisitas sangat penting untuk menciptakan kepaduan kebijakan dalam menghadapi masalah ini (Damanik, 2020). Sinergi dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Sinergisitas horizontal dapat dimunculkan dengan adanya kepaduan kebijakan antara satu kementerian dan kementerian yang lain. Jika ada perbedaan komando dalam pembuatan kebijakan maka akan berdampak buruknya praktik kebijakan di lapangan. Sedangkan sinergisitas secara vertikal terjadi di antara pemerintah pusat dan

4. Leadership Skill yang tidak menonjol

Pemimpin sebagai pengambil keputusan tertinggi perlu menonjolkan kemampuan kepemimpinannya terutama di masa krisis saat ini. Pemimpin yang tidak mampu adatu tidak memiliki leadership skill yang mumpuni akan kesulitan mengambil keputusan. Hal ini menyebabkan struktur di bawahnya menjadi tak terorganisir dengan baik sehingga kebijakan-kebijakan yang muncul pun tidak ada satu sistem komando yang terpadu.

daerah. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan data kondisi dan keadaan di daerah. Adanya karakter dan permasalahan yang berbeda pada setiap daerah perlu menjadi dasar pertimbangan. Sinergisitas antar pemimpin dalam pembuatan kebijakan akan juga meminimalisir adanya fenomena saling menyalahkan yang kerap terjadi.

3. Pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan membangun kepercayaan

Menjaga kepercayaan masyarakat menjadi hal penting bagi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat kebijakan yang diambil tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu langkah mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan menunjukkan sikap bahwa pemimpin berpihak sepenuhnya kepada masyarakat, bukan pada golongan maupun kepentingan lainnya (Moeljono, 2020).

4. Mengasah *leadership skill* dalam menghadapi krisis

Berbagai keberhasilan pemimpin negara lain dalam menghadapi pandemic COVID-19 adalah karena adanya kecepatan dan ketepatan pemimpin dalam mengambil kebijakan. Pemimpin harus dapat

Berbagai keberhasilan pemimpin negara lain dalam menghadapi pandemic COVID-19 adalah karena adanya kecepatan dan ketepatan pemimpin dalam mengambil kebijakan. Pemimpin harus dapat mempertimbangkan berbagai baik dan buruk dalam sebuah keadaan dan tidak menjadi abai terhadap persoalan yang muncul. Terdapat 19 leadership skill yang perlu dimiliki seorang pemimpin terutama dalam menghadapi krisis yakni : (1) menyadari bahwa menjadi pemimpin adalah kewajiban dan bukan hak, (2) berintegritas tinggi, (3) asertif, (4) memiliki rasa kasih sayang, (5) visioner, gigih dan

bermotivasi tinggi, (6) positif, kreatif, dan inovatif, (7) komunikatif dan terbuka, (8) mampu melakukan team work, (9) memiliki karakter yang kuat dan dewasa, (10) matang dalam mengendalikan emosi, (11) satunya kata dan perbuatan, (12) mampu menjadi role model, (13) sadar dan siap memimpin perubahan, (14) pembelajar, (15) mampu menurunkan ilmu dan pengalaman, (16) bertanggung jawab dan bertanggung gugat, (17) disiplin, (18) tidak segan untuk terjun ke detail, (19) mampu mempersiapkan generasi berikutnya (Moeljono, 2020).

REFERENSI

- Baldwin, Richard dan Beatrice Weder di Mauro. 2020. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. Centre for Economic Policy Research (CEPR). 33 Great Sutton Street London, EC1V 0DX UK.
- CCL. 2020. How to Lead Through a Crisis. <https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/how-to-lead-through-a-crisis/>. Diakses 28 Mei 2020.
- Daminik, Salomo. 2020. Merajut Ekonomi Kita Pasca Covid-19. Disampaikan dalam Webinar MDKIK 12 Mei 2020.
- Gugus Tugas Covid-19. 2020. Data Sebaran Covid-19 di Indonesia. <https://covid19.go.id/>.
- Hadna, Agus Heruanto. 2020. Policy Gap dan Prospek Kebijakan Pasca Covid-19. Disampaikan dalam Webinar MDKIK 12 Mei 2020.
- Humas. Kemnaker. 2020. Menaker Beri Bantuan Bagi Korban PHK dan Dirumahkan. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-beri-bantuan-bagi-korban-phk-dan-dirumahkan>.
- Menkes . 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). <http://hukor.kemkes.go.id/>.
- Moeljono, Djokosantoso. 2020. Quo Vadis Leadership Pasca Covid-19. Disampaikan dalam Webinar MDKIK 12 Mei 2020.



Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada

Jl. Tevesia Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta Indonesia 55281
Phone: 0274 547 867 Fax: 0274 556 563 Email: mdkik.pasca@ugm.ac.id